



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024-2026**

Sekretariat Daerah

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 887468

Fax. (0334) 887468 E-Mail: bag.umum@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, ridho dan inayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat menjalankan program pemerintah daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 disusun dan dirumuskan sebagai acuan, landasan, pedoman, arah kebijakan, tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang diharapkan akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dalam sistem Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah perencanaan strategis merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi dimasyarakat dimasa mendatang, melalui pendekatan perencanaan strategis, Sekretariat Daerah sebagai sentral dari administrasi dan manajemen Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini merupakan Intergrasi rencana strategi dari Bagian –bagian yang ada dilingkup Sekretariat Daerah, diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mengakomodasi Kebutuhan dan kepentingan Masyarakat sesuai dengan harapan Pemerintah melaksanakan prinsip prinsip Tata pemerintahan yang baik serta menjadikan Birokrasi sebagai pelayanan masyarakat.

Dokumen perencanaan Strategis dari Sekretariat Daerah disusun agar dapat menjadi pedoman program dan pelaksanaan tugas selama Tiga tahun kedepan dengan harapan dapat memperoleh hasil kerja yang bermanfaat.

Demikian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024-2025

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	
2.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	
2.7 Kerjasama Perangkat Daerah	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	
3.2 Isu Strategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran	
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026	
7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	
Bab VIII PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (Tiga) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Lumajang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Lumajang yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu Tiga tahun. Selain itu, Renstra Sekretariat Daerah Kota Lumajang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Lumajang, baik evaluasi Renstra maupun Renja Sekretariat Daerah Kota Lumajang.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Lumajang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

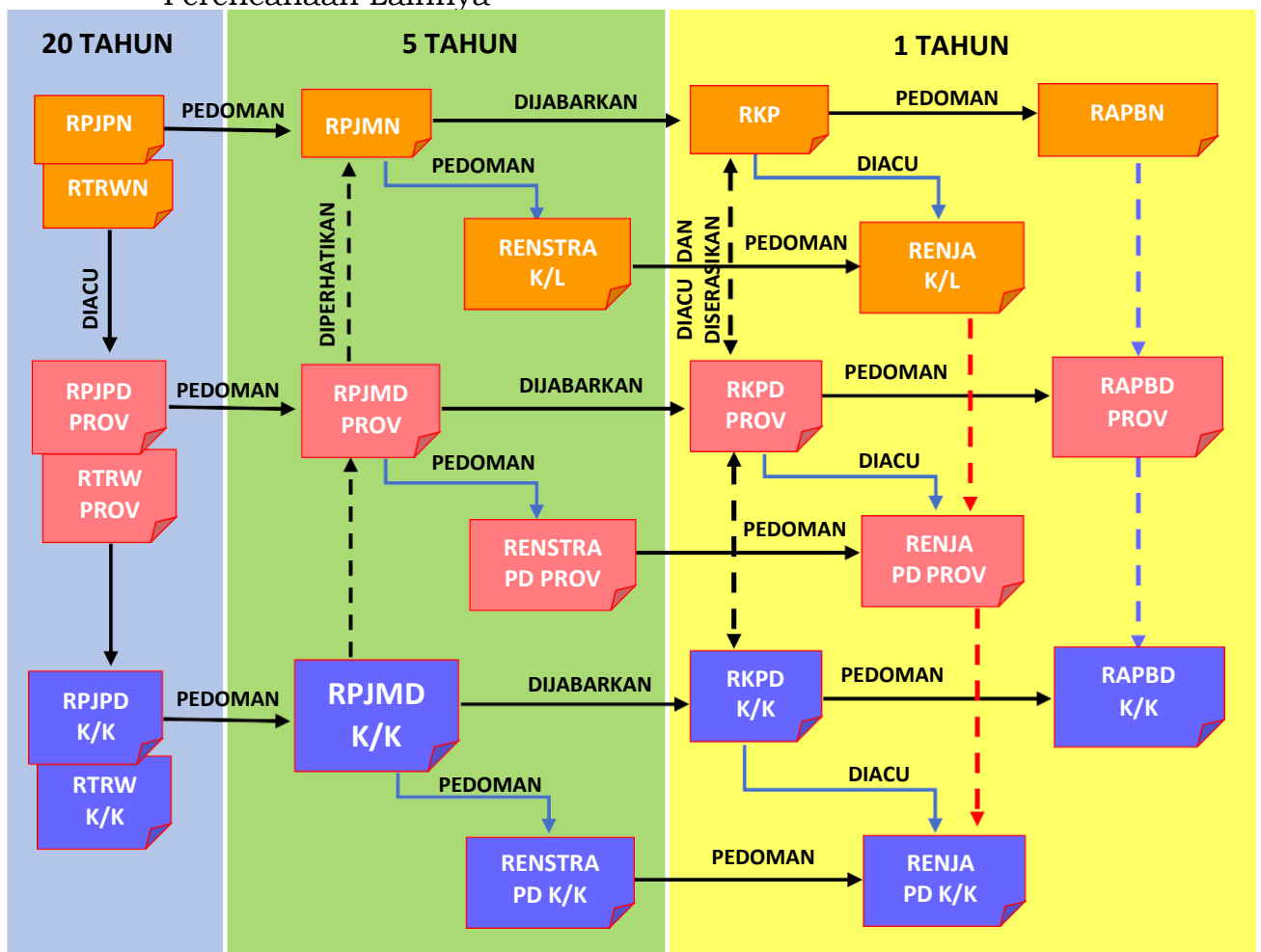
Dalam konteks akuntabilitas kinerja, maka rencana strategis merupakan landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui perencanaan strategis dapat diperoleh informasi tentang visi, misi, strategi dan kebijakan, tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi serta caramencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tentunya juga

memiliki kewajiban dalam menyusun rencana strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Sekretariat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan untuk :

1. melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
2. pedoman dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPD 2024-2026, sehingga tujuan dan sasaran tersebut dapat terlaksana secara sistematis dan terukur.
3. penyusunan tahapan kinerja tiap tahun sesuai dengan rentang waktu periode Renstra.

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Adapun keselarasan antara RPD Kab. Lumajang 2024-2026 dengan Renstra Sekretariat Daerah adalah bahwasanya Sekretariat Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sehingga diharapkan dokumen Renstra 2024-2026 menjadi panduan dalam dokumen perencanaan di tahun berikutnya.

1. 2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 - 2025 ;
3. Undang - Undang Nomor_23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor_23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 - 2025 ;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis Sekretariat Daerah (Renstra Setda) disusun dengan maksud agar menjadi pedoman, acuan dan rujukan bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya selama periode 2024 - 2026.

Adapun tujuan dari ditetapkannya Renstra Setda adalah :

1. Menjamin keselarasan antara sasaran yang ada di RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2024 - 2026 dengan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Setda 2024 - 2026.
2. Menjamin bahwa setiap pencapaian kinerja yang dapat direalisasikan oleh Kepala OPD dan/atau Kepala Bagian di lingkungan Setda selaras dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan dalam RPD 2024 - 2026.
3. Menjamin kualitas dan keselarasan antar dokumen perencanaan, mulai dari Renja (sebagai turunan langsung dari Renstra) hingga Perjanjian Kinerja (sebagai turunan langsung dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
4. sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja yang direalisasikan oleh Kepala OPD maupun seluruh jajaran dibawahnya, terlebih ketika capaian kinerja tidak memenuhi target kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Setda tahun 2024 - 2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, berikut indikator kinerjanya, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Perangkat Daerah
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.7. Kerjasama Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1 Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026
- 7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Penjelasan pasal demi pasal pada pasal 209 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. **Tugas Sekretariat Daerah** membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Adapun fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 89 tahun 2021 tentang **fungsi Sekretariat Daerah** sebagai berikut :

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah ;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintahan Kabupaten ;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, disebutkan bahwa tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terdiri:

1. Sekretaris Daerah

2. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** memiliki **Tugas** yaitu “membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif di bidang pemerintahan desa, otonomi daerah, pemerintahan umum,

penataan wilayah, pertanahan, kerjasama, hukum, hak asasi manusia, agama, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, penanganan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.”

fungsinya adalah

- 1) pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang pemerintahan desa, otonomi daerah, pemerintahan umum, penataan wilayah, kerjasama, hukum, hak asasi manusia, agama, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, penanganan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan desa, otonomi daerah, pemerintahan umum, penataan wilayah, kerjasama, hukum, hak asasi manusia, agama, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, penanganan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang pemerintahan desa, otonomi daerah, pemerintahan umum, penataan wilayah, kerjasama, hukum, hak asasi manusia, agama, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, penanganan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan desa, otonomi daerah, pemerintahan umum, penataan wilayah, kerjasama, hukum, hak asasi manusia, agama, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi,

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, penanganan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan fungsinya.

A) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, pembinaan administrasi dan pembinaan sumber daya serta aparatur dan manajemen pelaporan pemerintah daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah serta kerjasama dan administrasi kewilayahan.

Fungsi :

- 1) pelaksanaan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan.
- 2) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program/ kegiatan serta petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan
- 3) pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, supervisi, bimbingan dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan serta manajemen pelaporan pemerintah daerah
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan
- 5) pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan fungsinya.

B) Bagian Hukum mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan program serta petunjuk teknis penyempurnaan dan pembentukan produk hukum daerah dan telaahan hukum, bantuan hukum, penyuluhan hukum, dokumentasi hukum, hak asasi manusia, informasi hukum dan kajian hukum serta pembinaan penyusunan produk hukum desa

Fungsi :

- 1) pelaksanaan penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah dan telaahan hukum, bantuan hukum, penyuluhan hukum, dokumentasi hukum, hak asasi manusia, informasi hukum dan kajian hukum serta pembinaan penyusunan produk hukum desa
- 2) perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Hukum;
- 3) pelaksanaan fasilitasi, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan penyusunan produk hukum daerah
- 4) pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada perangkat daerah
- 5) pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- 6) pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang hukum.
- 7) pelaksanaan penyuluhan hukum, pembinaan kesadaran hukum dan sosialisasi produk hukum daerah
- 8) pelaksanaan fasilitasi, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.
- 9) pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi peraturan desa
- 10) pelaksanaan pembinaan produk hukum desa
- 11) pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi dan pemajuan hak asasi manusia.
- 12) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian hukum dalam laporan kinerja individu
- 13) pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

14) pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan fungsinya.

C) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsinya adalah :

- 1) pelaksanaan penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) penyusunan rumusan atau petunjuk teknis terkait fasilitasi kebijakan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang berkaitan dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat
- 5) pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi
- 6) pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan fungsinya.

3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif di bidang analisis makro ekonomi, sarana perekonomian, perdagangan, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, penanaman modal, energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan,

peternakan, perikanan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.

Fungsinya adalah :

- a) pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang analisis makro ekonomi, sarana perekonomian, perdagangan, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, penanaman modal, energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.
- b) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang analisis makro ekonomi, sarana perekonomian, perdagangan, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, penanaman modal, energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan serta pengadaan barang dan jasa
- c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang analisis makro ekonomi, sarana perekonomian, perdagangan, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, penanaman modal, energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan serta pengadaan barang dan jasa
- d) pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh Sekretaris Daerah di bidang analisis makro ekonomi, sarana perekonomian, perdagangan, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, penanaman modal, energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, penyusunan, pengendalian dan

evaluasi program pembangunan serta pengadaan barang dan jasa; dan

- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

D) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan pemantauan serta evaluasi terkait pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah perekonomian, dan sumber daya alam.

Fungsinya adalah

- 1) pelaksanaan penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan pembinaan badan layanan umum daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam.
- 2) penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari kebijakan pembinaan badan layanan umum daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam.
- 3) pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang berkaitan dengan pembinaan badan layanan umum daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pembinaan badan layanan umum daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam
- 5) pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi
- 6) pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- 7) pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bagian tugas dan fungsinya.

E) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan pemantauan serta evaluasi terkait pengelolaan, pembinaan dan advokasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan di Kabupaten Lumajang. Sedangkan **fungsinya** adalah :

- 1) pelaksanaan penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan pengelolaan, pembinaan dan advokasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan
- 2) pengoordinasian rencana pelaksanaan program kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) penyusunan perumusan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah
- 4) penyusunan kebijakan dan pengembangan terhadap seluruh Sistem Informasi Pengadaan barang dan Jasa beserta infrastrukturnya
- 5) fasilitasi kelompok kerja dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa
- 6) pelaksanaan pembinaan dan konsultasi bagi para pelaku pengadaan dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
- 7) pelaksanaan penyusunan program, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah
- 8) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian pengadaan barang dan jasa dalam laporan kinerja individu
- 9) pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bagian tugas dan fungsinya.

4 **Asisten Administrasi** mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif di bidang penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan, keuangan, sumber daya manusia dan aparatur, perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan, keprotokolan, serta tata usaha dan rumah tangga.

Fungsinya adalah:

- 1) pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan, keuangan, sumber daya manusia dan aparatur, perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan, keprotokolan, serta tata usaha dan rumah tangga
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan, keuangan, sumber daya manusia dan aparatur, perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan, keprotokolan, serta tata usaha dan rumah tangga
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan, keuangan, sumber daya manusia dan aparatur, perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan, keprotokolan, serta tata usaha dan rumah tangga
- 4) pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Sekretaris Daerah di bidang penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan, keuangan, sumber daya manusia dan aparatur, perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan, keprotokolan, serta tata usaha dan rumah tangga; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

F) Bagian Organisasi mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan program serta monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana dan kinerja.

Fungsinya adalah :

- 1) pelaksanaan penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja
- 2) penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari kebijakan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja
- 3) pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang berkaitan dengan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja
- 5) pelaporan atas pelaksanaan fungsi
- 6) pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Administrasi sesuai dengan bagian tugas dan fungsinya.

G) Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan program serta monitoring dan evaluasi di bidang protokol dan tata usaha pimpinan. **Fungsinya** adalah :

- 1) pelaksanaan penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan protokol dan tata usaha pimpinan
- 2) penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari kebijakan protokol dan tata usaha pimpinan
- 3) pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang

- berkaitan dengan protokol dan tata usaha pimpinan
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait protokol dan tata usaha pimpinan
 - 5) pelaporan atas pelaksanaan fungsi
 - 6) pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi; dan
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Administrasi sesuai dengan bagian tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang didukung oleh pegawai sebanyak 231 orang, terdiri atas 92 orang yang berstatus PNS dan 139 orang bersatus tenaga kontrak bulanan, dimana secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1

Table 2.1

Tabel Daftar pegawai di Lingkup Sekretariat Daerah Januari 2023

NO	SKPD	uraian					Jumlah		L	P	Jumlah
		Ess II	S. ahli	Ess III	Ess IV	staf PNS	PNS	PTT			
1	SEKRETARIAT	4	3	0	0	0	7	0	7	0	7
2	BAG. TATA PEMERINTAHAN	-		1	2	3	6	6	5	7	12
3	BAGIAN HUKUM	-		1	2	3	6	8	9	5	14
4	BAG.. KESRA	-		1	2	4	7	8	11	2	15
5	PEREKONOMIAN DAN SDA			1	1	3	5	3	6	2	8
6	BAG. BARANG DAN JASA	-		1	3	9	13	9	16	6	22
7	BAGIAN ORGANISASI	-		1	2	4	7	7	8	6	14
8	BAG. PROTUP	-		1	2	14	17	48	46	18	65
9	BAGIAN UMUM	-		1	2	21	24	57	59	18	81
	JUMLAH ASN 8 BAGIAN-2	4	3	8	16	61	92	146	167	64	238

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Daerah Januari 2023

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain dukungan sumber daya manusia (SDM), juga diperlukan dukungan

sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang secara pembidangan barang dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.2

Daftar Inventaris Sekretariat Daerah per 1 MEI 2023

NO	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	GOLONGAN TANAH	4	Bidang	Rp 2,533,256,267
2	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	3,894	Buah / Set	Rp 39,315,093,924
3	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	33	Buah	Rp 25,624,161,349
4	GOLONGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	4	Buah	Rp 1,303,288,355
5	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	1,360	buah/set	Rp 259,855,900
	Total Aset Tetap SETDA	5295	buah/set/bidang	Rp 69,035,655,794

Tabel 2.3 Inventaris Aset Kendaraan

No	Alat Angkutan	Jumlah	Nilai
1	Mobil	44 unit	Rp 12,511,050,750
2	Sepeda Motor	102 unit	Rp 1,579,971,627
3	Mini Bus	4 unit	Rp 1,093,216,750
4	sepeda kayuh	4 unit	Rp 59,000,000
5	bus	2 unit	Rp 1,606,838,627
6	truck	3 unit	Rp 754,392,800
7	pick up	4 unit	Rp 595,060,000
8	tangki	2 unit	Rp 30,000,000
9	gerobak dorong	2 unit	Rp 12,947,000
10	Kendaraan roda 3	4 unit	Rp 105,368,000
11	Gerobak sampah	4 unit	Rp 25,894,000
12	Kereta Sorong	5 unit	Rp 6,000,000
13	pick up	4 unit	Rp 595,060,000
14	tangki	2 unit	Rp 30,000,000
15	gerobak dorong	2 unit	Rp 12,947,000
16	Kendaraan roda 3	4 unit	Rp 105,368,000
17	Gerobak sampah	4 unit	Rp 25,894,000
18	Kereta Sorong	5 unit	Rp 6,000,000
	Total	201 unit	Rp19,155,008,554

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah selama kurun waktu 2019-2022 yaitu :

Tabel 2.4 TC 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
BAGIAN PROTOKOL DAN TU PIMPINAN																			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Keprotokolan				86	87	86	86.5	87	80.66	81.8	85.73	83.34	81.94	94%	94%	99.7%	96%	94%
2019																			
1	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				100%	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase pelayanan kedinasan (keprotokolan, pemberitaan, dan dokumentasi) bagi kepala daerah/wakil kepala daerah				100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
4	Persentase press release yang dikirimkan ke Diskominfo dan lembaga terkait (media massa)				100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase wartawan yang menghadiri jumpa pers				100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
2020																			
1	Persentase pemenuhan kebutuhan akan operasional perkantoran bagi ASN				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	87%	N/A	N/A	N/A	N/A	87%	N/A	N/A	N/A
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dilakukan pemeliharaan sehingga dalam kondisi layak pakai				N/A	87%	N/A	N/A	N/A	N/A	97%	N/A	N/A	N/A	N/A	111%	N/A	N/A	N/A
3	Persentase pelayanan kedinasan (keprotokolan dan kerumahtanggaan)				N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	bagi kepala daerah/wakil kepala daerah																		
2021-2023																			
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	98%	24%	N/A	N/A	99.5%	98%	24%
Bagian Organisasi																			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difasilitasi penerapan / implementasi SAKIP-nya	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2019																			
2	nilai SKM Bag. Organisasi	-	-	-	80	N/A	N/A	N/A	N/A	82.5	N/A	N/A	N/A	N/A	103%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase sarana dan prasarana yang layak	-	-	-	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	125%	N/A	N/A	N/A	N/A
4	nilai kenaikan indeks Reformasi birokrasi	-	-	-	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
2020																			
5	Persentase pemenuhan kebutuhan akan operasional perkantoran bagi ASN	-	-	-	80	100%	N/A	N/A	N/A	82.5	100%	N/A	N/A	N/A	103%	100%	N/A	N/A	N/A
6	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dilakukan pemeliharaan sehingga dalam kondisi layak pakai	-	-	-	80%	87%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	125%	100%	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
7	persentase OPD yang difasilitasi penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan tata laksana	-	-	-	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
2021																			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	-	-	-	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
2022 DAN 2023																			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	-	-	-	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difasilitasi penerapan / implementasi SAKIP-nya	-	-	-	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
Bagian Kesejahteraan Rakyat																			
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di pelayanan Kesejahteraan Rakyat			□	84	87	88	89	90	80.66	81.8	87.39	87.46	81.94	96%	94%	99%	98%	91%
2019 dan 2020																			
1	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		□	□	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	94%	N/A	N/A	N/A	100%	94%	N/A	N/A	N/A
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			□	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	87%	N/A	N/A	N/A	100%	87%	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			<input type="checkbox"/>	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
4	Persentase Fasilitas Kegiatan Keagamaan			<input type="checkbox"/>	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Sosial			<input type="checkbox"/>	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Persentase Fasilitas Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan			<input type="checkbox"/>	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2021 - 2023																			
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			<input type="checkbox"/>	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
2	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi			<input type="checkbox"/>	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
Bagian Hukum																			
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Hukum			<input type="checkbox"/>	83	84	84	84.5	85	79	80	82	83	0	95%	95%	97.6%	98%	0%
2019																			
1	Presentase peningkatan produk hukum yang diterbitkan			<input type="checkbox"/>	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Peningkatan Produk Hukum yang sesuai dengan kewenangan daerah			<input type="checkbox"/>	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Perda yang diusulkan ke DPRD			<input type="checkbox"/>	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3																			
4	Peningkatan Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Hukum			☐	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Presentase penanganan permasalahan hukum			☐	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
2020																			
1	Presentase Raperda yang disahkan menjadi Perda			☐	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah			☐	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Presentase Rancangan Peraturan Desa yang selaras Peraturan Perundang-undangan			☐	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Presentase Keterwakilan Stakeholder yang Mengikuti Uji Publik Perda			☐	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi hukum			☐	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Presentase penyelesaian permasalahan hukum Aparatur Pemkab Lumajang			☐	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2021-2023																			
	Persentase produk hukum daerah yang dilaksanakan			□	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	98%	24%	N/A	N/A	99.5%	98%	24%
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa																			
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA			□	N/A	84.77	85.33	85	86	N/A	85.33	87.72	89.07	84.48	N/A	100.66%	102.80 %	104.79 %	98.23 %
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			□	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	93.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	93.80%	N/A	N/A	N/A
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			□	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	69.30%	N/A	N/A	N/A	N/A	69.30%	N/A	N/A	N/A
	PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			□	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	68.37%	N/A	N/A	N/A	N/A	68.37%	N/A	N/A	N/A
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			□	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	84.47%	99.53%		N/A	N/A	84.47 %	99.53 %	15.55 %
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			□	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	84.93%	97.45%		N/A	N/A	84.93 %	97.45 %	0%
Bagian Umum																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Kerumahtangaan				86	87	88	89	90	81,59	90,85	87,42	86,13	N/a	11.35	-3.7755	- 1.47563	- 9.43922	N/a

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/a	0	N/A	N/a	N/A	N/A
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/a	0	N/A	N/a	N/A	N/A
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/a	0	N/A	N/a	N/A	N/A
	PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/a	0	N/A	N/a	N/A	N/A
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	25	N/a	N/A	0	N/A	N/A
Bagian Tata Pemerintahan																			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan			□	86	87	86	86.5	87	81.47	80.59	86.11	85	77.38	95%	93%	100.1%	98%	89%
2019																			

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase layanan administrasi perkantoran			□	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur			□	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	86%	N/A	N/A	N/A	N/A	86%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			□	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	96%	N/A	N/A	N/A	N/A	96%	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase MOU yang ditindaklanjuti PKS			□	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah pendapatan yang didapatkan dari lelang sewa tanah			□	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	86%	N/A	N/A	N/A	N/A	86%	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi			□	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	81.3	N/A	N/A	N/A	N/A	81%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Persentase koordinasi tentang			□	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
7	penyelesaian pemerintahan desa yang difasilitasi																		
8	1.Persentase Pembakuan Nama Rupabumi Kecamatan 2.Persentase Penegasan Batas wilayah Kecamatan			□	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	N/A	N/A	N/A	N/A
9	1. Persentase kecamatan yang telah memenuhi standar PATEN 2, Persentase Pengiriman Dokumen LKPj, LPPD dan ILPPD Kabupaten Tepat waktu			□	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu			□	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	88%	N/A	N/A	N/A	N/A	88%	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2020																			
1	Persentase pemenuhan kebutuhan akan operasional perkantoran bagi ASN			<input type="checkbox"/>	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dilakukan pemeliharaan sehingga dalam kondisi layak pakai			<input type="checkbox"/>	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
3	Persentase laporan (laporan keuangan dan laporan kinerja) yang disusun sesuai ketentuan			<input type="checkbox"/>	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi yang dilaksanakan			<input type="checkbox"/>	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
5	Persentase pemenuhan kebutuhan akan operasional perkantoran bagi ASN			<input type="checkbox"/>	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2021 - 2023																			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			□	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
2	Persentase Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Yang Terfasilitasi			□	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
BAGIAN PEREKONOMIAN																			
I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Perekonomian			□	86	86	87	88	89	87	88	89	87.74	90	101%	102%	102.3%	90%	100%
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			□	N/A	N/A	N/A	10 kebij akan	10 kebij akan	94%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	99%	30%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			□	N/A	N/A	N/A	5 Doku men	5 Doku men	89%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	70%	0%

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			□	N/A	N/A	N/A	1 Doku men	1 Doku men	100%	N/A	N/A	100%	100 %	N/A	N/A	N/A	90%	0%
4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			□	N/A	N/A	N/A	8 Kebij akan	8 kebja kan	100%	N/A	N/A	100%	100 %	N/A	N/A	N/A	100%	0%
5	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			□	N/A	N/A	N/A	2 doku men	2 doku men2	100%	N/A	N/A	100%	100 %	N/A	N/A	N/A	100%	0%

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			□	N/A	N/A	N/A	2 doku men	2 doku men	N/A	87%	N/A	100%	100 %	N/A	N/A	N/A	100%	0%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			□	N/A	N/A	N/A	1 doku men	1 doku men	N/A	97%	N/A	100%	100 %	N/A	N/A	N/A	100%	0%

Tabel 2.5. TC-24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Bagian Protokol																	
Tahun 2019-2020																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,304,532,736	3,428,525,250	N/A	N/A	N/A	1,228,247,723	2,969,486,388	N/A	N/A	N/A	94%	87%	N/A	N/A	N/A	163%	142%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	161,610,000	1,313,642,500	N/A	N/A	N/A	143,616,164	1,279,689,839	N/A	N/A	N/A	89%	97%	N/A	N/A	N/A	713%	791%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,262,100,000	2,902,237,500	N/A	N/A	N/A	1,164,898,475	2,754,355,425	N/A	N/A	N/A	92%	95%	N/A	N/A	N/A	130%	136%
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	306,974,600	N/A	N/A	N/A	N/A	300,451,950	N/A	N/A	N/A	N/A	98%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021-2023																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	5,581,613,423	6,678,111,070	7,426,217,235	N/A	N/A	4,892,208,105	6,528,882,667	1,779,236,488	N/A	N/A	88%	98%	24%	15%	-20%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Bagian Organisasi																	
2019																	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	371,051,900	N/A	N/A	N/A	N/A	313,179,534	N/A	N/A	N/A	N/A	84%	N/A	N/A	N/A	N/A	-47%	-39%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	89,725,000	N/A	N/A	N/A	N/A	58,526,146	N/A	N/A	N/A	N/A	65%	N/A	N/A	N/A	N/A	-41%	-35%
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	754,223,100	N/A	N/A	N/A	N/A	531,129,734	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	N/A	N/A	N/A	N/A	-89%	-84%
2020																	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	N/A	197,188,420	N/A	N/A	N/A	N/A	191,028,700	N/A	N/A	N/A	N/A	97%	N/A	N/A	N/A	-18%	-15%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	N/A	52,925,000	N/A	N/A	N/A	N/A	38,006,873	N/A	N/A	N/A	N/A	72%	N/A	N/A	N/A		
PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN, AKUNTABILITAS KINERJA DAN TATA LAKSANA	N/A	84,276,268	N/A	N/A	N/A	N/A	84,132,268	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A		
2021-2023																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	275,461,700	339,070,750	690,440,500	N/A	N/A	266,211,005	327,925,426	108,265,729	N/A	N/A	97%	97%	16%	23%	23%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Bagian Kesejahteraan Rakyat																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	223,346,800	162,608,320	N/A	N/A	N/A	183,545,083	155,936,384	N/A	N/A	N/A	82%	96%	N/A	N/A	N/A	-27%	-15%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	57,450,000	65,550,000	N/A	N/A	N/A	53,810,000	63,633,500	N/A	N/A	N/A	94%	97%	N/A	N/A	N/A	14%	18%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	11,700,000	3,754,000	N/A	N/A	N/A	7,878,000	3,694,000	N/A	N/A	N/A	67%	98%	N/A	N/A	N/A	-68%	-53%
Program fasilitasi kegiatan keagamaan	2,541,434,200	N/A	N/A	N/A	N/A	2,325,104,500	N/A	N/A	N/A	N/A	91%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial	1,143,840,500	N/A	N/A	N/A	N/A	1,135,208,000	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program fasilitasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan	808,528,500	N/A	N/A	N/A	N/A	764,825,000	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	N/A	2,479,100,500	N/A	N/A	N/A	N/A	2,382,462,500	N/A	N/A	N/A	N/A	96%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	243,263,700	270,666,500	263,009,684	N/A	N/A	237,298,727	260,535,882	44,744,956	N/A	N/A	98%	96%	17%	11%	10%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	N/A	N/A	34,317,886,510	46,431,692,400	52,336,396,550	N/A	N/A	33,710,290,478	45,278,811,222	7,031,756,780	N/A	N/A	98%	98%	13%	26%	34%
Bagian Hukum																	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	138,000,000	102,792,273	N/A	N/A	N/A	131,548,613	98,922,518	N/A	N/A	N/A	95%	96%	N/A	N/A	N/A	-26%	-25%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	38,000,000	26,645,227	N/A	N/A	N/A	35,867,291	26,586,037	N/A	N/A	N/A	94%	100%	N/A	N/A	N/A	-30%	-26%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12,000,000	9,582,000	N/A	N/A	N/A	11,359,200	7,314,000	N/A	N/A	N/A	95%	76%	N/A	N/A	N/A	-20%	-36%
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM	605,000,000	314,553,500	N/A	N/A	N/A	369,037,944	293,064,500	N/A	N/A	N/A	61%	93%	N/A	N/A	N/A	-48%	-21%
PRORAM PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM MASYARAKAT	350,000,000	76,260,000	N/A	N/A	N/A	305,348,000	75,340,000	N/A	N/A	N/A	87%	99%	N/A	N/A	N/A	-78%	-75%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM	400,000,000	269,490,000	N/A	N/A	N/A	312,515,500	264,634,000	N/A	N/A	N/A	78%	98%	N/A	N/A	N/A	-33%	-15%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	553,463,000	326,638,000	922,402,298	N/A	N/A	99,344,000	363,646,150	97,861,250	N/A	N/A	18%	111%	11%	N/A	N/A
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa																	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	N/A	451,653,400	N/A	N/A	N/A	N/A	339,761,121	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	93.80%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	N/A	13,442,500	N/A	N/A	N/A	N/A	8,915,280	N/A	N/A	N/A	N/A	66.32%	N/A	N/A	N/A	100%	69.30 %
PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	N/A	32,510,000	N/A	N/A	N/A	N/A	22,228,000	N/A	N/A	N/A	N/A	68.37%	N/A	N/A	N/A	100%	68.37 %
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	N/A	N/A	246,158,400	213,086,400	525,648,750	N/A	N/A	207,921,482	212,094,535	N/A	N/A	N/A	84.47%	99.53%	N/A	N/A	N/A
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	N/A	N/A	268,860,000	251,833,450	197,112,000	N/A	N/A	228,340,200	245,404,097	N/A	N/A	N/A	84.93%	97.45%	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Bagian Umum																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6,194,649,785	Rp 3,152,632,380	N/A	N/A	N/A	Rp 5,436,096,456	Rp 2,482,743,831	N/A	N/A	N/A	87.75%	78.75%	N/A	N/A	N/A	-49.1	-54.3
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp 9,347,692,295	Rp 2,850,786,564	N/A	N/A	N/A	Rp 7,735,463,713	Rp 1,820,483,062	N/A	N/A	N/A	82.75%	63.86%	N/A	N/A	N/A	-69.5	-76.5

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Rp 2,903,360,000	Rp 196,125,000	N/A	N/A	N/A	Rp 2,324,924,666	Rp 136,002,500	N/A	N/A	N/A	80.08%	69.34%	N/A	N/A	N/A	-93.2	-94.2
PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN	Rp 2,293,750,000	Rp 1,249,685,000	N/A	N/A	N/A	Rp 2,095,594,000	Rp 900,240,250	N/A	N/A	N/A	91.36%	72.04%	N/A	N/A	N/A	-45.5	-57.0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6,194,649,785	Rp 3,152,632,380	N/A	N/A	N/A	Rp 5,436,096,456	Rp 2,482,743,831	N/A	N/A	N/A	87.75%	78.75%	N/A	N/A	N/A	-49.1	-54.3

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp 9,347,692,295	Rp 2,850,786,564	N/A	N/A	N/A	Rp 7,735,463,713	Rp 1,820,483,062	N/A	N/A	N/A	82.75%	63.86%	N/A	N/A	N/A	-69.5	-76.5
Sekretariat Daerah																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	Rp23,535,392,151	Rp28,970,465,210	Rp28,662,800,087	N/A	N/A	Rp22,391,231,194	Rp28,162,769,296	N/A	N/A	N/A	95.14 %	97.21 %	18.53%	11.02	25%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	N/A	N/A	Rp34,791,188,570	Rp47,280,542,558	Rp54,748,363,713	N/A	N/A	Rp34,069,244,847	Rp46,166,070,922	N/A	N/A	N/A	97.92 %	97.64 %	13,44%	25.85	35%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	N/A	N/A	Rp15,146,605,700	Rp3,886,880,220	Rp362,233,500	N/A	N/A	Rp8,726,783,300	Rp867,777,487	N/A	N/A	N/A	57.62 %	22.33 %	0%	-82.51	-80%

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63 Tahun 2003 membedakan jenis pelayanan menjadi tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok Pelayanan Administratif
- b. Kelompok Pelayanan Barang
- c. Kelompok Pelayanan Jasa

sasaran manajemen pelayanan umum adalah kepuasan. Kepuasan menyangkut dua komponen yakni komponen layanan dan komponen produk.

Berikut adalah daftar kelompok sasaran pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan tugas dan fungsi tiap bagian.

Tabel 2.6

Tabel Kelompok Sasaran Pelayanan

Bagian	Kelompok sasaran pelayanan
TATA PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
HUKUM	PERANGKAT DAERAH DAN MASYARAKAT
KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA KEAGAMAAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	BUMD, BLUD dan Pelaku Usaha Perekonomian
PENGADAAN BARANG DAN JASA	PERANGKAT DAERAH DAN PELAKU USAHA
ORGANISASI	PERANGKAT DAERAH
PROTOKOL DAN TU PIMPINAN	PIMPINAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN KELOMPOK MASYARAKAT
UMUM	PIMPINAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN KELOMPOK MASYARAKAT

2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra usaha adalah sebuah badan atau perusahaan yang bersedia untuk bekerjasama dengan perusahaan yang lebih kecil darinya. Atau bisa diartikan hubungan kerjasama antara perusahaan kecil dengan perusahaan yang lebih besar dengan mempertimbangkan segala keuntungan dan kebutuhan.

Begitu juga Sekretariat Daerah dimana untuk melakukan pelayanan tidak dapat dilakukan secara mandiri dan diperlukan pihak lain untuk melakukan kerjasama untuk terlaksananya pelayanan yang dibutuhkan.

Berikut adalah daftar Mitra Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan pelayanan yang dilaksanakan.

Tabel 2.7

Tabel Mitra Perangkat Daerah

Bagian	Mitra Pelayanan publik
TATA PEMERINTAHAN	-
HUKUM	Lbh Posbakummadin dan Kejaksaan Negeri Lumajang
KESEJAHTERAAN RAKYAT	-
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	-
PENGADAAN BARANG DAN JASA	-
ORGANISASI	-
PROTOKOL DAN TU PIMPINAN	-
UMUM	Rekanan/Penyedia yang bergerak dibidang penyediaan Jasa Makanan dan Minuman maupun Sarpras

2.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD merupakan organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik.

Banyak BUMD yang beroperasi dengan retribusi yang membuatnya berbeda dengan pajak dari lembaga pemerintahan. BUMD berbeda dengan birokrasi pemerintahan daerah terkait pendanaan, biaya transaksi, hak-hak pekerja, pengawasan keuangan, izin untuk beroperasi di luar yurisdiksinya, dan terkadang dalam keadaan tertentu.

Dampak dan pengaruh dari BUMD dapat berbeda dengan badan usaha milik negara (BUMN). Korporatisasi dari suatu badan layanan umum dapat dimanfaatkan secara lokal daripada nasional sebagai cara melayani publik secara hibrid dan fleksibel seperti kemitraan publik-swasta dan kerja sama antarpemerintahan daerah. BUMD dapat mengenakan retribusi. Pengaruhnya dapat berbeda karena keahlian regulator dan kapasitas kontrak yang rendah untuk pemerintah daerah, dan nilai ekonomi yang tinggi.

Daftar BUMD yang bekerja sama dengan Sekretariat Daerah Lumajang adalah :

1. Bank Jatim
2. PDAM

2.7 Kerjasama Perangkat Daerah

Data Kerjasama Sekretariat Daerah yang dilakukan sejak tahun 2018-2022 adalah Tidak ada Kerjasama yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah sejak tahun 2018 sampai 2022 dengan pihak manapun.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala yaitu

1. Belum Optimalnya tata kelola pengadaan barang dan jasa
2. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

Munculnya hambatan dan tidak maksimalnya pelayanan sekretariat daerah merupakan bukti masih ada hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk itu perlu diteliti apa yang memunculkan hambatan didalam pelayanan.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Barang/Jasa belum sesuai dengan perencanaan yang telah Ditetapkan2. Pembangunan / Pemeliharaan bangunan yang dilaksanakan oleh pihak ke 3 melebihi batas waktu yang ditentukan3. Pengoperasian Sistem Informasi / Aplikasi yang belum memadai4. Kurangnya fasilitas produk pelayanan kedinasan5. Adanya Perbedaan

		<p>pemahaman terkait keprotokolan</p> <p>6. Belum optimalnya tata kelola administrasi perekonomian dan pembangunan</p> <p>7. Kurang optimalnya fasilitasi kerjasama pembangunan</p> <p>8. Kurang optimalnya kualitas pelaporan pembangunan daerah</p> <p>9. Kurangnya fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan</p> <p>10. Adanya perubahan komponen dalam evaluasi SAKIP</p> <p>11. Adanya masa transisi dalam proses penyederhanaan birokrasi</p> <p>12. Kurangnya Kepatuhan terhadap Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat</p>
--	--	--

3.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

a) Belum Optimalnya tata kelola pengadaan barang dan jasa

Disebabkan karena :

- 1) Pengadaan Barang/Jasa belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- 2) Pembangunan / pemeliharaan bangunan yang dilakukan oleh pihak ke 3 lebih dari waktu yang telah ditentukan
- 3) Pengoperasian sistem informasi /Aplikasi yang belum memadai
- 4) Adanya fluktuasi harga kebutuhan pokok yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

b) Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

Disebabkan karena :

- 1) Kurangnya fasilitas produk pelayanan kedinasan
- 2) Adanya perbedaan pemahaman terkait keprotokolan
- 3) Belum optimalnya tata kelola administrasi perekonomian dan pembangunan
- 4) Kurang optimalnya kualitas pelaporan pembangunan daerah
- 5) Kurangnya fasilitasi kegiatan kesejahteraan social dan kegiatan keagamaan
- 6) Adanya perubahan komponen dalam evaluasi SAKIP
- 7) Adanya masa transisi dalam proses penyederhanaan birokrasi
- 8) Kurangnya kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang undangan dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat

Jadi berdasarkan data diatas merupakan asal penyebab yang mengakibatkan pelayanan di Sekretariat Daerah kurang

optimal dalam memberikan pelayanan publik dan pelayanan pengadaan barang dan jasa. Maka yang harus dilakukan adalah merencanakan peningkatan pelayanan untuk mengurangi hambatan dan memaksimalkan pelayanan .

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yang kurun waktu yang ditentukan dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang saat ini adalah 3(tiga) Tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan dan sasaran juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pelayanan publik yang diberikan dapat mencapai target yang ditetapkan. tujuan dan sasaran sekretariat daerah untuk tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 TC 25

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Target		
					2024	2025	2026
Optimalnya penyelenggaraan reformasi Birokrasi		Indeks Pelayanan Publik	Angka	Rata rata capaian IPP dari 8 Bagian	60 (B-)	61 (B-)	62 (B-)
	Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta	Indeks tata kelola pengadaan	Angka	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ	70 (Cukup)	80 (baik)	90 (Baik)
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyediaan Kebijakan Perekonomian	Persen	Jumlah kebijakan Perekonomian yang diterbitkan dibagi jumlah kebijakan Perekonomian yang direncanakan (x100)	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Target		
					2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata rata nilai sinergitas kecamatan	Angka	Jumlah skor Indikator Administrasi (Organisasional) seluruh kecamatan/Jumlah Kecamatan	55	56	57
		Indeks kesalehan sosial	Angka	Mengacu kepada data Kementerian agama (Form Kuisisioner)	60	65	70
		Indeks Reformasi Hukum	Angka	Mengacu kepada Kemenkumham	71	72	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	rata rata capaian ikm dari 8 bagian	83,5	84	84,5

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Dengan diketahuinya sasaran strategi perangkat daerah maka diperlukan Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan juga indikator yang bisa menjelaskan bagaimana perangkat daerah bisa mencapai target sasaran strategi yang telah ditetapkan , maka disusunlah Cascading Kinerja Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada table 4.2 dibawah ini

Tabel 4.2

Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan

Tujuan	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian		Persentase fasilitasi Administrasi

Tujuan	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
	Perangkat Daerah		Kepegawaian PD
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Bimbingan teknis implementasi perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitas pengadaan BMD
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang

Tujuan	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
			Disediakan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitas pemeliharaan BMD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara

Tujuan	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
		Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase fasilitas administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wabup
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan
	Penataan Organisasi		persentase OPD yang kinerja organisasinya

Tujuan	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
			berkategori sangat baik
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi
			Angka Inflasi Daerah
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		persentase pencapaian pelaksanaan administrasi pembangunan
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	Pengelolaan Pengadaan		Persentase Pelaksanaan

Tujuan	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
	Barang dan Jasa		Pengadaan Barang / Jasa sesuai aturan
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah kebijakan perekonomian yang dihasilkan
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian
		Koordinasi,	Jumlah Dokumen

Tujuan	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
		Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi
			Persentase Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi
			persentase kebijakan yang mendukung penyesuaian regulasi, penyederhanaan prosedur dan menjawab kebutuhan masyarakat.
	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Tujuan	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
			yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase produk hukum daerah yang dilaksanakan
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang disusun
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Berdasarkan Data Cascading diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menunjang pelayanan publik di Sekretariat Daerah membutuhkan 3 Program , 20 kegiatan dan juga 72 sub-kegiatan untuk dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal untuk

memenuhi sasaran strategi yang telah ditetapkan.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Sekretariat Daerah adalah ilmu dan seni yang direncanakan secara cermat untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada, baik berupa personil, anggaran, peralatan dan dokumen. Strategi diperlukan untuk memperjelas langkah-langkah apa yang hendak dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sekaligus sebagai pedoman / acuan agar upaya mewujudkan tujuan dan sasaran tetap berada dalam koridor tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. **Arah kebijakan** dapat diartikan sebagai rangkaian konsep manajemen yang menjadi garis haluan / pedoman dan berisi mengenai prinsip dan cara bertindak dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tabel 5.1 TC 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Meningkatkan Nilai Indeks Pelayanan Publik	1 Menyusun rencana aksi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan SKM 2 Meningkatkan Responsifitas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan 3 Penyediaan Sarpras Khusus bagi pengguna layanan disabilitas , termasuk menyediakan sarpras lain yang menunjang pelayanan publik 4 Penyediaan ruang / meja khusus bagi konsultasi dan pengaduan disetiap unit kerja, termasuk melakukan pencatatan atas segala jenis pengaduan yang masuk dari berbagai saluran pengaduan. 5. Menciptakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat dan menunjang kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta	Meningkatkan nilai Indeks tata kelola pengadaan	1 Meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		2 Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang jasa (SDM PBJ) 3 Meningkatkan kematangan unit kerja pengadaan barang jasa (UK PBJ)
		Mengoptimalkan Persentase Penyediaan Kebijakan Perekonomian	Meningkatkan pembinaan dalam kegiatan TPID dan TPKAD untuk TPID ke birokrasi ekonomi dan TPKAD ke memajukan umkm
		Meningkatkan Rata rata nilai sinergitas kecamatan	melakukan pembinaan dan sosialisasi indikator penilaian sinergitas pada kecamatan diwilayah kabupaten lumajang serta memberikan penghargaan kepada kecamatan yang mencapai nilai tertinggi
		Meningkatkan Nilai Indeks kesalehan sosial	Meningkatkan/Meningkatnya Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan ketertiban umum secara komprehensif
		Meningkatkan Nilai Indeks Reformasi Hukum	1 Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian hukum dan Ham untuk melakukan harmonisasi regulasi serta fasilitasi terhadap produk hukum 2. Meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang undangan (legal drafter) daerah yang berkualitas 3 Meningkatkan kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang undangan berdasarkan hasil reuiu KEMENKUMHAM 4 Penataan Data base peraturan perundang undangan yang sesuai standar yang ditetapkan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Meningkatkan kecepatan /waktu penyelesaian pelayanan kepada masyarakat 2 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarpras bagi penyandang disabilitas

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan pada Bab IV Tujuan dan Sasaran dan Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, maka perlu dituangkan rumusan program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Setda ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran serta program yang tidak mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran.

Program yang dikelompokkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah program-program yang bersifat teknis, sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di tiap-tiap Bagian. Sedangkan program yang tidak mendukung secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran adalah program-program yang bersifat penyelenggaraan rutin administrasi perkantoran, misalnya program pelayanan administrasi perkantoran dan program pemeliharaan berkala kendaraan dinas / operasional.

Untuk dapat mengukur kinerja program maupun kegiatan diperlukan indikator kinerja, dimana kriteria indikator kinerja harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measureable, Achievable, Relevant dan Time Bond). Adapun perbedaan antara indikator kinerja program dengan indikator kinerja kegiatan adalah untuk indikator kinerja program bersifat outcome, sedangkan indikator kinerja kegiatan bersifat output.

Secara rinci perencanaan program, kegiatan serta pendanaan indikatif Sekretariat Daerah tampak pada tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Tabel 6.1.Tabel TC 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01	Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	persen	jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan dikali 100%	100%	100%	Rp 82,238,051,580	100%	Rp 47,463,687,201	100%	Rp 38,861,163,800	100%	Rp 168,562,902,581	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.01	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	persen	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	Rp 52,091,375	Rp 55,340,265	Rp 58,735,944	Rp 166,167,584	100%	100%	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.01.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Rp 21,692,375	6 dokumen	Rp 23,180,765	4 dokumen	Rp 24,817,994	14 dokumen	Rp 69,691,134	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.01.02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11 dokumen	8 dokumen	Rp 17,241,000	8 dokumen	Rp 18,172,000	8 dokumen	Rp 19,018,000	24 dokumen	Rp 54,431,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.01.03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11 dokumen	16 dokumen	Rp 3,974,000	16 dokumen	Rp 4,172,700	16 dokumen	Rp 4,391,270	48dokumen	Rp 12,537,970	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.01.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5	Rp 5,752,000	5	Rp 6,039,600	5	Rp 6,355,960	5	Rp 18,147,560	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.01.07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	72 Laporan	Rp 3,432,000	72 Laporan	Rp 3,775,200	72 Laporan	Rp 4,152,720	216 laporan	Rp 11,359,920	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.02	Terpenuhinya fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	pemenuhan fasilitas dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi kebutuhan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dikali 100 %	100%	100 %	Rp 9,709,243,939	100 %	Rp 10,658,633,133	100 %	Rp 11,711,357,646	100 %	Rp 32,079,234,719	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.02.01	Tersedian Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ 12 bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 orang/ 12 bulan	86 orang / 12 bulan	9,419,360,139 Rp	86 orang / 12 bulan	10,361,296,153 Rp	86 orang / 12 bulan	11,397,425,768 Rp	86 orang / 36 bulan	31,178,082,061 Rp	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
01.2.02.02	Tersedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68 dokumen	74 dokumen	262,733,600 Rp	74 dokumen	268,062,860 Rp	74 dokumen	282,321,446 Rp	222 dokumen	282,321,446 Rp	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.02.04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	Rp 10,111,200	12 dokumen	Rp 11,122,320	12 dokumen	Rp 12,234,552	36 dokumen	Rp 33,468,072	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 laporan	4 laporan	Rp 17,039,000	4 laporan	Rp 18,151,800	4 laporan	Rp 19,375,880	12 laporan	Rp 54,566,680	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.03	Tepenuhnya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	persen	Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	Rp 28,223,200	100%	Rp 30,231,920	100%	Rp 32,441,512	100%	Rp 90,896,632	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.03.01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	7 dokumen	Rp 20,087,200	7 dokumen	Rp 21,872,120	7 dokumen	Rp 23,835,532	21 dokumen	Rp 65,794,852	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.03.05	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	4 Laporan	Rp 4,476,000	4 Laporan	Rp 4,699,800	4 Laporan	Rp 4,945,980	12 Laporan	Rp 14,121,780	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.03.06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 laporan	26 laporan Rp 3,660,000	26 laporan Rp 3,660,000	26 laporan Rp 3,660,000	26 laporan Rp 3,660,000	78 Laporan Rp 10,980,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG			

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.05	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	persen	Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	Rp 18,283,984,000	100%	Rp 510,235,000	100%	Rp 553,353,500	100%	Rp 19,347,572,500	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.05.02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 paket	6 paket	Rp 17,985,284,000	4 paket	Rp 194,065,000	4 paket	Rp 205,566,500	14 paket	Rp 18,384,915,500	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.05.10	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 orang	500 orang	Rp 284,000,000	500 orang	Rp 300,000,000	500 orang	Rp 330,000,000	1500 orang	Rp 914,000,000	Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.05.11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	20 orang	Rp 14,700,000	20 orang	Rp 16,170,000	20 orang	Rp 17,787,000	60 orang	Rp 48,657,000	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.06	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	persen	Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan kali 100	100%	100%	Rp 3,779,495,748	100%	Rp 5,682,394,837	100%	Rp 4,732,306,608	100%	Rp 14,194,197,193		SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp		
4.01.01.2.06.01	Tersedian ya Kompon e Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Penyedia an Kompon e Instalasi Listrik/P eneranga n Banguna n Kantor	Jumlah Paket Kompon e Instala si Listrik/ Penera ngan Bangun an Kantor yang Disedia kan	Paket	Jumlah Paket Kompon e Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor yang Disediaka n	2 paket	2 pake t	Rp 44,614,413	2 paket	Rp 49,047,535	2 paket	Rp 53,923,968	6 pake t	Rp 147,585,916	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.06.04	Tersedian ya Bahan Logistik Kantor	Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedia kan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	27 paket	28 pake t	Rp 660,751,114	29 paket	Rp 767,967,541	27 paket	Rp 777,053,422	82 pake t	Rp 2,205,772,077	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.06.05	Tersedia Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	15 paket	Rp 262,066,611	15 paket	Rp 326,225,497	14 paket	Rp 264,863,093	44 paket	Rp 853,155,201	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.06.06	Tersedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 dokumen	10896 Dokumen	Rp 89,083,500	13392 Dokumen	Rp 97,401,850	13392 Dokumen	Rp 106,552,035	37880 laporan	Rp 293,037,385	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.06.07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4	Rp 58,729,176	4	Rp 64,602,094	4	Rp 71,062,303	12	Rp 194,393,573	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.06.08	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	39 laporan	53	Rp 1,138,711,394	53	Rp 2,484,887,027	53	Rp 1,366,022,839	159	Rp 4,989,621,260	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.06.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 laporan	96	Rp 1,525,539,540	96	Rp 1,892,263,294	96	Rp 2,092,828,948	288	Rp 5,510,631,782	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.07	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	persen	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	Rp 35,512,808,532	100%	Rp 12,755,590,752	100%	Rp 3,399,476,232	100%	Rp 51,667,875,516	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.07.01	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	0	Rp	2 unit	Rp 1,050,060,000	unit	Rp -	8 unit	Rp 1,050,060,000	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.07.02	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	330 unit	Rp 32,384,399,850	7 unit	Rp 8,558,196,570		Rp -	62 unit	Rp 40,942,596,420	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.07.03	Tersedianya Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	6 unit	0	Rp	5 Unit	Rp 18,925,500	1 unit	Rp 271,067,550	6 unit	Rp 289,993,050	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.07.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 unit	428 unit	Rp 3,128,408,682	423 unit	Rp 3,128,408,682	280 unit	Rp 3,128,408,682	513 unit	Rp 9,385,226,046	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.08	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	Rp 4,258,345,279	100%	Rp 4,776,657,786	100%	Rp 4,909,856,905	100%	Rp 13,944,859,970		SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.08.01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162 laporan	62 laporan	Rp 44,396,000	62 laporan	Rp 54,206,000	62 laporan	Rp 64,570,000	186 Laporan	Rp 163,172,000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.08.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	97 laporan	97 laporan	Rp 1,517,931,792	97 laporan	Rp 1,668,938,171	97 laporan	Rp 1,817,760,248	291 Laporan	Rp 5,004,630,212	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.08.03	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	Rp 129,901,000	25 laporan	Rp 352,411,200	25 laporan	Rp 152,431,200	75 laporan	Rp 634,743,400	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.08.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	123 laporan	109 laporan	Rp 2,566,116,487	109 laporan	Rp 2,701,102,415	109 laporan	Rp 2,875,095,457	327 Laporan	Rp 8,142,314,358	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.09	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100	100%	100%	Rp 3,923,369,789	100%	Rp 4,712,390,348	100%	Rp 5,250,544,463	100%	Rp 13,886,304,601	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.09.01	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	6 unit	Rp 227,184,757	5 unit	Rp 416,773,232	5 unit	Rp 477,250,556	5 unit	Rp 1,121,208,545	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.09.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143 unit	180 unit	Rp 2,219,913,033	180 unit	Rp 2,680,973,116	180 unit	Rp 3,006,648,208	180 unit	Rp 7,907,534,356	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.09.03	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	n/a	18 unit	Rp 64,120,000	18 unit	Rp 70,532,000	18 unit	Rp 77,585,200	18 unit	Rp 212,237,200	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.09.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	154 unit	496 unit	Rp 412,152,000	471 unit	Rp 444,112,000	471	Rp 479,060,500	465 unit	Rp 1,335,324,500	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.09.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	6 unit	7 Unit	Rp 1,000,000,000	7 Unit	Rp 1,100,000,000	7 Unit	Rp 1,210,000,000	7 Unit	Rp 3,310,000,000	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.11	Terpenuhinya fasilitasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Persen	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wabup yang terlaksana ÷ Jumlah fasilitasi administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wabup yang harus dilaksanakan × 100%	100%	100%	Rp 2,242,632,135	100%	Rp 2,829,126,135	100%	Rp 2,792,626,135	100	Rp 7,864,384,405	Bagian protokol dan Tu	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.11.01	Tersedian ya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang /12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ 12Bulan	1 Orang/12 Bulan	Rp 1,368,676,135	2 Orang/12 Bulan	Rp 1,368,676,135	2 Orang/12 Bulan	Rp 1,368,676,135	2 orang/36 Bulan	Rp 4,106,028,405	Bagian protokol dan Tu	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.11.02	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	9 Paket	Rp 22,200,000	27 Paket	60,000,000	18 Paket	53,500,000	54 Paket	135,700,000	Bagian protokol dan Tu	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.11.03	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5 orang	5 orang Rp 30,000,000	15 orang Rp 90,000,000	10 orang Rp 60,000,000	30 orang Rp 180,000,000	Bagian protokol dan Tu	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG				
4.01.01.2.11.04	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ 12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1 Orang/12 Bulan Rp 821,756,000	2 Orang/ 12 Bulan Rp 1,310,450,000	2 Orang/Bulan Rp 1,310,450,000	2 orang/36 Bulan Rp 3,442,656,000	Bagian protokol dan Tu	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG				

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.12	Terpenuhinya Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	persen	pemenuhan Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah dibagi kebutuhan Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah dikali 100 %	100%	100 %	Rp 1,349,124,482	100 %	Rp 2,517,797,024	100 %	Rp 2,485,174,855	100 %	Rp 6,352,096,361	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.12.01	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	11 Paket	Rp 1,073,622,583	11 Paket	Rp 1,332,169,739	11 Paket	Rp 1,180,984,841	33 paket	Rp 3,586,777,163	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.12.02	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	11 Paket	Rp200,000,000	11 Paket	Rp1,102,575,196	11 Paket	Rp1,212,832,716	33 paket	Rp 2,515,407,911	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.12.03	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 paket	7 paket	Rp 75,501,899	7 Paket	Rp 83,052,089	7 Paket	Rp 91,357,298	21 paket	Rp 249,911,286	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.13	Terlaksananya Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	Persentase OPD yang kinerja organisasinya berkategori sangat baik	Persen	Jumlah OPD yang berkategori kinerja sangat baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100	n/a	65%	Rp 503,000,000	67%	Rp 403,000,000	70%	Rp 403,000,000	70%	Rp 1,309,000,000	Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.13.01	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	Rp 60,000,000	1 dokumen	Rp 60,000,000	1 dokumen	Rp 60,000,000	3 dokumen	Rp 180,000,000	Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.13.02	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	1 laporan	Rp 353,000,000	1 laporan	Rp 253,000,000	1 laporan	Rp 253,000,000	3 laporan	Rp 859,000,000	Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.01.2.13.03	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1 dokumen	Rp 23,000,000	1 dokumen	Rp 23,000,000	1 dokumen	Rp 23,000,000	3 dokumen	Rp 69,000,000	Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.01.2.13.04	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	1	Rp 67,000,000	1 dokumen	Rp 67,000,000	1 dokumen	Rp 67,000,000	3 dokumen	Rp 201,000,000	Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01.2.14	Terpenuhinya fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	Jumlah fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan dibagi jumlah acara pimpinan yang membutuhkan pendampingan keprotokolan × 100%	N/A	100 %	Rp 2,595,733,100	100 %	Rp 2,532,290,000	100 %	Rp 2,532,290,000	100 %	Rp 7,660,313,100	Bagian protokol dan Tu	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
01.2.14.01	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	12 Laporan	Rp 1,751,283,100	12 Laporan	Rp 1,460,790,000	12 Laporan	Rp 1,460,790,000	36 Laporan	Rp 4,672,863,100	Bagian protokol dan Tu	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01.2.14.02	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12 Laporan	Rp 844,450,000	12 Laporan	Rp 1,071,500,000	12 Laporan	Rp 1,071,500,000	36 Laporan	Rp 2,987,450,000	Bagian protokol dan Tu	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.02	Meningkatnya Fasilitasi kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terasilitasi	persen	Jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang direncanakan	N/A	100 %	Rp48,863,062,563	100 %	Rp52,790,881,548	100 %	Rp55,874,419,703	100 %	Rp157,528,363,814	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah yang Terasilitasi	persen	Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama yang Terasilitasi/Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah yang harus di fasilitasi (x100%)	100%	100 %		100 %		100 %		100 %	Bagian Tata pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			persentase kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur dan menjabarkan kebutuhan masyarakat.	persen	Jumlah Kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur dan menjabarkan kebutuhan masyarakat hingga tahun n dibagi jumlah regulasi yang diterbitkan hingga tahun n-1 (X 100%)	96	95%		95%		95%		95%	Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.02.2.01	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi dokumen tata pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	persen	jumlah kegiatan tata pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan tata pemerintahan yang harus dilaksanakan (x 100%)	100%	100%	Rp 615,000,000	100%	Rp 525,000,000	100%	Rp 540,000,000	100%	Rp 1,680,000,000	Bagian Tata pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.02.2.01.01	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 dokumen	9 dokumen	Rp 300,000,000	9 dokumen	Rp 310,000,000	9 dokumen	Rp 325,000,000	18 dokumen	Rp 935,000,000	Bagian Tata pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.02.2.01.02	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000 Rp	1 dokumen	100,000,000 Rp	1 dokumen	100,000,000 Rp	3 dokumen	300,000,000 Rp	Bagian Tata pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.02.2.01.03	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 dokumen	4 dokumen	215,000,000 Rp	3 dokumen	115,000,000 Rp	3 dokumen	115,000,000 Rp	10 dokumen	445,000,000 Rp	Bagian Tata pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.02.2.02	Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	persen	jumlah kegiatan keagamaan sosial dan kemasyarakatan yang terfasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan sosial dan masyarakat yang direncanakan (x100%)	87%	100%	Rp 47,324,492,400	100%	Rp 51,330,381,548	100%	Rp 54,363,419,703	100%	Rp 153,018,293,651	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.02.2.02.01	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	24 Dokumen	32,409,503,600 Rp	24 Dokumen	35,368,413,024 Rp	25 Dokumen	37,905,254,326 Rp	73 dokumen	105,683,170,950 Rp	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.02.2.02.02	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan	5 dokumen	4 dokumen	Rp 14,793,408,800	4 Dokumen	Rp 15,743,108,524	4 Dokumen	Rp 16,217,419,376	12 dokumen	Rp 46,753,936,700	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
4.01.02.2.02.03	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 dokumen	4	Rp	121,580,000	4 Dokumen	Rp	218,860,000	5 Dokumen	Rp	240,746,000	13 dokumen	Rp	581,186,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.02.2.03	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi urusan hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang dilaksanakan	persen	Jumlah produk hukum yang ditetapk an ditambah bantuan hukum yang difasilitasi dibagi jumlah pengajuan produk hukum dan bantuan hukum yang diajukan (x 100%)	100%	100%	Rp 868,570,163	100%	Rp 880,000,000	100%	Rp 915,000,000	100%	Rp 2,663,570,163	Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.02.2.03.01	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang disusun	dokumen	Jumlah produk hukum yang disusun	500 dokumen	500 dokumen	Rp 345,000,000	500 dokumen	Rp 350,000,000	500 dokumen	Rp 365,000,000	1500 dokumen	Rp 1,060,000,000	Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.02.2.03.02	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (aparatur dan maskin)	5 Kasus	5 Kasus	Rp 347,900,000	5 Kasus	Rp 350,000,000	5 Kasus	Rp 365,000,000	15 kasus	Rp 1,062,900,000	Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.02.2.03.03	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	dokumen	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	500 Dokumen	500 Dokumen	Rp 175,670,163	500 Dokumen	Rp 180,000,000	500 Dokumen	Rp 185,000,000	1500 dokumen	Rp 540,670,163	Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.02.2.04	Terlaksananya kegiatan fasilitasi kerjasama daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	persen	Jumlah kerjasama (KSB) yang difasilitasi dibagi jumlah kerjasama (KSB) yang diusulkan (x100%)	100%	100%	Rp 55,000,000	100%	Rp 55,500,000	100%	Rp 56,000,000	100%	Rp 166,500,000	Bagian Tata pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.02.2.04.01	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 50,000,000	12 Dokumen	Rp 50,000,000	13 Dokumen	Rp 50,000,000	37 dokumen	Rp 150,000,000	Bagian Tata pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.02.2.04.03	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama pada tahun n-1	na	1 laporan	5,000,000 Rp	1 laporan	5,500,000 Rp	1 laporan	6,000,000 Rp	3 laporan	16,500,000 Rp	Bagian Tata pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03	Meningkatkan pemenuhan fasilitas kegiatan perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Persen	Jumlah pemenuhan Kegiatan Perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi dibagi jumlah kebutuhan Kegiatan Perekonomian dan pembangunan yang harus difasilitasi (x100%)	N/a	100 %	Rp	100 %	Rp	100 %	Rp	100 %	Rp	Bagian BPPJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
			Angka Inflasi Daerah	Persen	Data mengacu dari Bank Indonesia	N/a	5.51 %		5.51 %		5.51 %	5.51 %		5.51 %		

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.02	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase pencapaian pelaksanaan administrasi pembangunan	Persen	Jumlah pemenuhan Kegiatan Perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi dibagi jumlah kebutuhan Kegiatan Perekonomian dan pembangunan yang harus difasilitasi (x100%)	100%	100%	Rp 70,590,000	100%	Rp 77,649,000	100%	Rp 85,413,900	100%	Rp 233,652,900	BAGIAN BPU	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.02.01	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	N/A	1 Dokumen	Rp 7,040,000	1 Dokumen	Rp 7,744,000	1 Dokumen	Rp 8,518,400	3 Dokumen	Rp 23,302,400	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.03.2.02.02	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	N/A	2 Laporan	Rp 10,250,000	2 Laporan	Rp 11,275,000	2 Laporan	Rp 12,402,500	6 Laporan	Rp 33,927,500	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.02.03	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	2	Rp 53,300,000	2 Laporan	Rp 58,630,000	2 Laporan	Rp 64,493,000	6 Laporan	Rp 176,423,000	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.02	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase pencapaian pelaksanaan administrasi pembangunan	Persen	Jumlah pemenuhan Kegiatan Perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi dibagi jumlah kebutuhan Kegiatan Perekonomian dan pembangunan yang harus difasilitasi (x100%)	100%	100%	Rp 70,590,000	100%	Rp 77,649,000	100%	Rp 85,413,900	100%	Rp 233,652,900	BAGIAN BPU	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.02.01	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	N/A	1 Dokumen	Rp 7,040,000	1 Dokumen	Rp 7,744,000	1 Dokumen	Rp 8,518,400	3 Dokumen	Rp 23,302,400	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.03.2.02.02	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	N/A	2 Laporan	Rp 10,250,000	2 Laporan	Rp 11,275,000	2 Laporan	Rp 12,402,500	6 Laporan	Rp 33,927,500	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.02.03	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	2	Rp 53,300,000	2	Rp 58,630,000	2	Rp 64,493,000	6	Rp 176,423,000	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.02	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase pencapaian pelaksanaan administrasi pembangunan	Persen	Jumlah pemenuhan Kegiatan Perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi dibagi jumlah kebutuhan Kegiatan Perekonomian dan pembangunan yang harus difasilitasi (x100%)	100%	100%	Rp 70,590,000	100%	Rp 77,649,000	100%	Rp 85,413,900	100%	Rp 233,652,900	BAGIAN BUKU	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.02.01	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	N/A	1 Dokumen	Rp 7,040,000	1 Dokumen	Rp 7,744,000	1 Dokumen	Rp 8,518,400	3 Dokumen	Rp 23,302,400	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.03.2.02.02	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	N/A	2 Laporan	Rp 10,250,000	2 Laporan	Rp 11,275,000	2 Laporan	Rp 12,402,500	6 Laporan	Rp 33,927,500	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.02.03	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	2	Rp 53,300,000	2 Laporan	Rp Rp58,630,000	2 Laporan	Rp Rp64,493,000	6 Laporan	Rp 176,423,000	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.03.2.03	Terkelolanya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai aturan	Persen	Jumlah pengadaan barang / jasa yang terlaksana dibagi jumlah pengadaan barang / jasa yang direncanakan	N/a	100 %	Rp 143,812,000	100 %	Rp 158,193,200	100 %	Rp 174,012,520	100 %	Rp 476,017,720	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.03.01	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	8 Dokumen	8 Dokumen	Rp 80,837,000	8 Dokumen	Rp 88,920,700	8 Dokumen	Rp 97,812,770	24 dokumen	Rp 267,570,470	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 22,067,000	3 Dokumen	Rp 24,273,700	3 Dokumen	Rp 26,701,070	6 dokumen	Rp 73,041,770	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.03.03	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	180 orang	180 orang	Rp 40,908,000	190 orang	Rp 44,998,800	200 orang	Rp 49,498,680	570 orang	Rp 135,405,480	BAGIAN PBJ	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.03.2.01	Penerbitan kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang dihasilkan	kebijakan	jumlah kebijakan Perekonomian yang dihasilkan	3 Kebijakan	3 kebijakan	Rp 303,180,870	3 kebijakan	Rp 325,020,000	3 kebijakan	Rp 325,300,000	6 kebijakan	Rp 953,500,870	Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.01.01	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 dokumen	5 dokumen	Rp 2,520,000	5 dokumen	Rp 3,220,000	5 dokumen	Rp 3,500,000	15 dokumen	Rp 9,240,000	Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 laporan	4 laporan	Rp 291,660,870	4 laporan	Rp 312,800,000	4 laporan	Rp 312,800,000	12 laporan	Rp 917,260,870	Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahunan perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen	1 dokumen	9,000,000 Rp	1 dokumen	9,000,000 Rp	1 dokumen	9,000,000 Rp	3 dokumen	27,000,000 Rp	Bagian Perencanaan	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
4.01.03.2.04	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	kebijakan	jumlah kebijakan yang dihasilkan	6 kebijakan	6 kebijakan	20,350,000 Rp	9 kebijakan	21,900,000 Rp	9 kebijakan	23,300,000 Rp	18 kebijakan	65,550,000 Rp	Bagian Perencanaan	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.04.01	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 dokumen	2 dokumen	Rp 4,050,000	2 dokumen	Rp 5,100,000	2 dokumen	Rp 5,500,000	6 Dokumen	Rp 14,650,000	Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.2.04.02	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 dokumen	2 dokumen	Rp 7,700,000	2 dokumen	Rp 8,000,000	2 dokumen	Rp 8,800,000	6 Dokumen	Rp 24,500,000	Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan dibuat IKU adalah untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah sehingga dirumuskan IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Table 7.1 IKU Sekretariat Daerah

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan /Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks tata kelola pengadaan	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
	Persentase Penyediaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan Perekonomian yang diterbitkan dibagi jumlah kebijakan Perekonomian yang direncanakan (x100)	Bagian Perekonomian	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata rata nilai sinergitas kecamatan	Jumlah skor Indikator Administrasi (Organisasional) seluruh kecamatan/ Jumlah Kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah

	Indeks kesalehan sosial	Mengacu kepada data Kementrian agama (Form Kuisisioner)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum	Mengacu kepada Kemenkumham	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat	rata rata capaian ikm dari 8 bagian	Seluruh Bagian Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaran Urusan PD

Sebagai bentuk komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, maka dirumuskanlah indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah periode 3 tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 7.1. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD.

Tabel 7.2.TC -28

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang untuk Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Indeks Pelayanan Publik	Angka	rata rata capaian IPP dari 8 bagian	51,48	60 (B-)	61 (B-)	62 (B-)	62 (B-)
	Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian	Indeks tata kelola pengadaan	Nilai	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ	N/A	70 (Cukup)	80 (baik)	90 (Baik)	90 (Baik)
	serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyediaan Kebijakan Perekonomian	Persen	Jumlah kebijakan yang diterbitkan dibagi jumlah kebijakan yang direncanakan (x100)	n/a	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kegiatan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Persen	Jumlah pemenuhan Kegiatan Perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi dibagi jumlah kebutuhan Kegiatan Perekonomian dan pembangunan yang harus difasilitasi (x100%)	N/a	100%	100%	100%	100%
		ANGKA INFLASI DAERAH	Persen	Data mengacu dari Bank Indonesia	N/a	5.51%	5.51%	5.51%	5.51%
	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	rata rata capaian ikm dari 8 bagian	85,53	83,5	84	84,5	84,5

Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
	publik	Indeks Reformasi Hukum	Angka	Mengacu kepada Kemenkumham	N/A	71	72	73	73
		Rata rata nilai sinergitas kecamatan	Angka	Jumlah skor Indikator Administrasi (Organisasional) seluruh kecamatan/Jumlah Kecamatan	N/A	55	56	57	57
		Indeks kesalehan sosial	Angka	Mengacu kepada data Kementerian agama	N/A	60	65	70	70
	Meningkatnya Fasilitasi kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	Persen	Jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang direncanakan	N/A	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi	persen	Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama yang Terfasilitasi/Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah yang harus di fasilitasi (x100%)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur dan menjawab kebutuhan masyarakat.	persen	Jumlah Kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur dan menjawab kebutuhan masyarakat hingga tahun n dibagi jumlah regulasi yang diterbitkan hingga tahun n-1 (X 100%)	96%	95%	95%	95%	95%
	Terselenggaranya	Persentase pemenuhan	persen	jumlah fasilitasi kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
	Fasilitasi Kebutuhan Operational Kantor	fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		operasional perkantoran yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan dikali 100%					

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD (Rencana Pembangunan Daerah). Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Lumajang, 2 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH



Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004